



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
INTISARI	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENGANTAR	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	11
1.3. Tinjauan Pustaka dan Keaslian Penelitian.....	23
1.3.1. Tinjauan Pustaka.....	23
1.3.2. Keaslian Penelitian	38
1.4. Tujuan Penelitian.....	60
1.5. Manfaat Penelitian.....	60
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	61
2.1. Landasan Teori	61
2.1.1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	61



2.1.2. Teori Penentuan Batas Negara	72
2.1.3. Teori Implementasi Kebijakan.....	89
2.1.4. Teori Ketahanan Wilayah	93
2.2. Kerangka Pemikiran	100
BAB III METODE PENELITIAN.....	107
3.1. Lokasi Penelitian	107
3.2. Jenis Penelitian	108
3.3. Sumber Data Penelitian	110
3.4. Tahapan Penelitian	113
3.4.1. Pengumpulan Data.....	113
3.4.2. Uji Keabsahan Data	119
3.4.3. Pengolahan Data.....	122
3.4.4. Analisis Data.....	123
BAB IV DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	131
4.1. Gambaran Umum Pulau Sebatik	131
4.2. Administrasi Pulau Sebatik	134
4.2.1. Kecamatan Sebatik	135
4.2.2. Kecamatan Sebatik Barat.....	137
4.2.3. Kecamatan Sebatik Timur	138
4.2.4. Kecamatan Sebatik Tengah	140
4.2.5. Kecamatan Sebatik Utara	141
4.3. Lintasan Sengketa Pulau Sebatik	143
4.3.1. Periode 1850-1891.....	143
4.3.2. Periode 1891-1915.....	150



4.3.3. Periode 1915-1983.....	152
4.3.4. Periode 1983-2019.....	154
4.3.5. Periode 2019-Sekarang.....	155
BAB V SENGKETA WILAYAH PULAU SEBATIK DALAM KERANGKA ADMINISTRASI	159
5.1. Hasil Penelitian	159
5.1.1. Status Hukum Garis Batas Pulau Sebatik	159
5.1.2. Proses Negosiasi.....	167
5.2. Pembahasan	176
5.2.1. Status Hukum Garis Batas Pulau Sebatik	176
5.2.2. Proses Negosiasi.....	213
BAB VI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN PULAU SEBATIK	236
6.1. Hasil Penelitian	236
6.1.1. Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan.....	236
6.1.2. Kebijakan Terhadap Dampak Demarkasi Ulang Th 2019 .242	
6.2. Pembahasan.....	251
6.2.1. Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan.....	251
6.2.2. Kebijakan Terhadap Dampak Demarkasi Ulang Th 2019 .278	
BAB VII IMPLIKASI DEMARKASI ULANG TERHADAP KETAHANAN WILAYAH	303
7.1. Hasil Penelitian	303



7.1.1. Aspek Geografis.....	304
7.1.2. Aspek Sumber Daya.....	304
7.1.3. Aspek Demografi	305
7.1.4. Aspek Ideologi	306
7.1.5. Aspek Politik.....	306
7.1.6. Aspek Ekonomi.....	308
7.1.7. Aspek Sosial Budaya.....	309
7.1.8. Aspek Pertahanan dan Keamanan.....	310
7.2. Pembahasan	311
7.2.1. Aspek Geografis.....	311
7.2.2. Aspek Sumber Daya.....	318
7.2.3. Aspek Demografi	324
7.2.4. Aspek Ideologi	329
7.2.5. Aspek Politik.....	337
7.2.6. Aspek Ekonomi.....	340
7.2.7. Aspek Sosial Budaya.....	347
7.2.8. Aspek Pertahanan dan Keamanan.....	351
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	367
8.1. Kesimpulan	367
8.1.1. Sengketa Wilayah Pulau Sebatik Pasca Demarkasi Ulang oleh Indonesia dan Malaysia Tahun 2019 dalam Kerangka Administrasi Perbatasan.....	367
8.1.2. Implementasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik Pasca Demarkasi Ulang oleh Indonesia dan Malaysia Tahun 2019 dalam Mewujudkan	



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sengketa Batas antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik dan Implikasinya Terhadap Administrasi

Perbatasan, Pengelolaan Kawasan serta Ketahanan Wilayah

AMIN NURDIN, Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, S.H., M.Si.; I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Ketahanan Wilayah	368
8.1.3. Implikasi Demarkasi Ulang oleh Indonesia dan Malaysia	
Tahun 2019 Terhadap Ketahanan Wilayah.....	370
8.2. Rekomendasi	371
8.2.1. Rekomendasi Teoretis.....	371
8.2.2. Rekomendasi Praktis.....	372
8.2.3. Rekomendasi Model Penyelesaian Sengketa	373
DAFTAR PUSTAKA	376